
**PENGARUH KINERJA APARATUR DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

Muhamad Mulyadi

Institut pemerintahan dalam negeri
email: m.mulyadi@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap transparansi keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada desa di Kabupaten Lombok Barat. Dan menggunakan tehnik sampel *purposive* dan sampel yang digunakan 110 orang dan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah ,dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap transparansi. Hasil penelitian ini menegaskan juga dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu terkait dengan *agency teory* dan *Theory of Reasoned Action* dimana terdapat hubungan yang sangat erat mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dimana akan berdampak terciptanya pengelolaan keuangan desa yang sangat baik dan juga memberikan dampak terhadap transparansi keuangan desa.

Kata Kunci: Kinerja Aparatur; Kejelasan Anggaran; Transparansi.

1. Latara Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan kucuran dana desa dengan jumlah yang relative besar. Berkenaan dengan dana yang dialokasikan ke desa, informasi yang disampaikan dinas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa provinsi Nusa Tenggara Barat

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran penilaian yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa. Kinerja aparat pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan serta keahlian aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik yang menunjukkan rendahnya pertanggungjawaban atau akuntabilitas setiap aktivitas aparatur pemerintah desa.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan". Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi. Deskripsi dari kinerja menyangkut dua komponen

yaitu tujuan dan ukuran, penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel.

Transparansi keuangan desamerupakan sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, dan hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Agar transparansi pengelolaan pelaporan keuangan dapat cepat diakses oleh masyarakat maka pemerintah desa perlu membentuk norma-norma yang baik terutama norma subyektif.

Transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Selain itu, menurut Locke dalam Kurnia (2004) mengatakan bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas.

Sasaran anggaran akan membantu aparatatur untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga transparansi keuangan semakain kurang baik (Kenis dalam Putra, 2013).

Fitri Lestari (2015), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik tidak memberi dampak terhadap akuntabilitas kinerja instansipemerintah. Sedangkan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Nasrul Kahpi Lubis (2017) faktor – faktor yang transparansi pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Secara parsial tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh

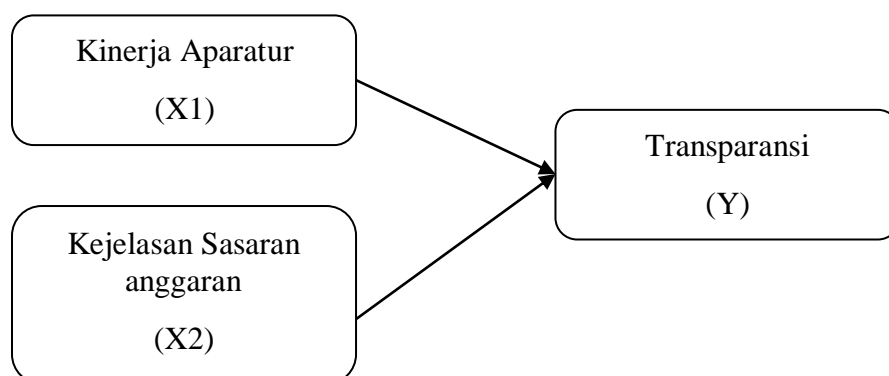
terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara parsial ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan. Hasil ini menyimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan dapat memediasi (intervening) hubungan tekanan eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori agensi dapat yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Teori agensi menguraikan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan konsep *Good Corporate Governance* menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja perusahaan (Sefiana, 2009).

Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976)



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan transparansi, sebagai variabel dependen (variabel yang

dipengaruhi), sedangkan kinerja aparatur pemerintah desa, dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen (variabel yang mempengaruhi).

Penelitian ini dilakukan terhadap parapengelola keuangan desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, aparat pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa mengenai keuangan desa agar membentuk transparansi di Kabupaten Lombok Barat. Populasi meliputi dari 119 desa di Kabupaten Lombok Barat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis yang memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Indriantoro dan Supomo, 2014:1152). Data dalam penelitian ini berupa data primer.

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:93). Dalam menjawab skala *likert* ini, responden hanya member tanda *checklist* atau tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai pertanyaan dan selanjutnya perlu dilakukan penyekoran. Bobot penilaian skala *likert* tampak pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 1 Bobot Penilaian

Pertanyaan	Skor Positif
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu – Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2012:)

Penelitian ini menggunakan data primer melalui teknik survei. responden adalah kepala desa, sekretaris desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Lombok Barat yang berperan dalam mengelola dan mengawasi keuangan pemerintah desa.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil analisis penelitian ini akan di jelaskan bersama dengan pembahasan penelitian yaitu pada hasil *r square* dan uji hipotesis. Nilai koefisien Adjusted R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel dependent.

**Tabel 2
Hasil Determinasi (R²)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.7050 ^a	.555	.522	3.455

a. Predictors: (Constant), prosocial behavior, norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan sasaran anggaran

Berdasarkan tabel diatas besarnya angka koefisien determinasi 0,522 sama dengan 52,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa, kinerja aparatur pemerintah desa dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap transparansi keuangan desa sebesar 52,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) Model 1

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	449.064	4	112.266	33.482	.000 ^a
	Residual	537.279	65	8.266		
	Total	986.343	69			

a. Predictors: (Constant), prosocial behavior, norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan sasaran anggaran

b. Dependent Variable: transparansi

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig untuk hasil uji kelayakan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen, kinerja aparatur pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran mampu memprediksi variabel dependen transparansi. Begitu juga dengan nilai F_{hitung} lebih besar dengan nilai F_{tabel} $33,482 > 2,51$ artinya variabel independen mampu memprediksi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Model 1

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig
	B	Std. Error			
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	.345	.156		4.346	.000
Kejelasan sasaran anggaran	.232	.132		3.897	.000

a. Dependent Variable: transparansi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis sebagai berikut:

Variabel kinerja aparatur pemerintah desa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,346 lebih besar dari t_{tabel} 1,997 atau nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima bahwa kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di kabupaten Lombok Barat.

Kinerja merupakan prosedur yang meliputi (1) penetapan standar kinerja; (2) penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar ini; (3) memberi umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi lagi.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan". Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai

oleh seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi Rivai (2006:309).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 4,346 lebih besar dari 1,997 dengan koefisien jalur 0,236 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,031 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat. Artinya semakin bagus kinerja aparatur pemerintah desa akan menyebabkan transparansi keuangan desa semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan M Amin (2020), menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa dan pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa.

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,897 lebih besar dari t_{tabel} 1,997 atau nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di kabupaten Lombok Barat.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Selain itu, menurut Locke dalam Kurnia (2004) mengatakan bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 3,897 lebih besar dari 1,997 dengan koefisien jalur 0,232 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat. Artinya semakin sesuai kejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan transparansi keuangan desa semakin baik di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Lestari (2015), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik tidak memberi dampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap transparansi keuangan desa. Untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah desa dan kejelasan sasaran anggaran dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat.

REFRENSI

- Anwar Prabu Mangkunegara (2000) Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Ke 2, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Arifin, S. (2007). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, Suatu Perspektif dari Segi Ketahanan Nasional: studi kasus Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ariyanto, D. (2014). *Does the Balinese Tri Hita Karana Culture Affect the Adoption and Usage of Information Technology Systems? Information and Knowledge Management*. 1(9), 150-160
- Azen, I. Dan M. Fishbein. 2005 Attitudes Personality Dan Behavior. Open University Pres. Mcgraw – Hill Education
- Diansari, E. R. (2013). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Deslerr. Gary. (1997). Management sumber daya manusia. Terjemahan benyamin. Molan. Edisi bahasa indonesia. PT Prenhallind. Jakarta.
- Diputra, A. P. (2012). Pengaruh Manajemen Berbasis Kinerja, dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman). *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mad.
- Eko Setyanto. (2018). Faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntani*, 9 nomor 1(2086–4159), 89–105
- Enggar; Sri Rahayu; dan Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi. Volume 13 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, Jambi.
- Fitri Lestari (2015), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program Studi Akuntansi FE UMRAH
- Lubis, N. K. (2017). Jurnal penelitian ekonomi akuntansi (jensi), vol. 1, no. 2, desember 2017. *Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(Kualitas Pelaporan Keuangan), 1–13. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/issue/view/46>
- Manggaukang Raba (2006) Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi, UMM, Pres, Malang.
- Nadirsyah Dkk (2012) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
- Niluh Ayu Mahayani (2017) *Prosocial Behavior* Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, 130 No. 2, Juli 2017. Universitas Udayana

- N.L Supadmi (2018) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Udayana.
- Nurofik (2013), Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Transparansi Keuangan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Shende Suresh, Dan Tony Bennett. 2004 Concept Paper 2: Transparency And Accountability In Public Financial Administration UNDESA.
- Siagian Sondang (1995) Teori Motivasinya Aplikasi Dan. PT Rineka Citra, Jakarta.
- Suarmanayasa, I. N. (2017). Pengaruh Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Perdesaan di Provinsi Bali *Disertasi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa) Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sukijan. (2012). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Studi Kasus di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Veithzel, Rivai, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Werimon, S. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015)